

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Aplikasi SIPAGA pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah belum dikelola dengan sistem dan manajemen yang efektif untuk itu perlu ditunjang dengan menggunakan aplikasi SiPAGA SIPBMD untuk membantu pemerintah dalam melakukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah terutama dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik agar memudahkan pengurus barang dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, Terwujudnya integrasi antar sistem informasi yang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama yang terkait perencanaan dan penganggaran.

Dalam penggunaan aplikasi SiPAGA SIPBMD juga terdapat beberapa hambatan seperti belum adanya regulasi yang mengharuskan OPD menggunakan aplikasi SiPAGA terhadap RKBMD pada seluruh daerah di Sumatera Barat, Seringnya terjadi pergantian user operator pada OPD sehingga operator belum menguasai barang yang dimiliki dan kodefikasinya, adanya pergantian atasan langsung sehingga mempengaruhi kebijakan yang diambil berdampak pada output dari SiPAGA

5.2 Saran

Untuk dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik khususnya dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, penulis memberikan saran

agar BPKAD Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan peraturan yang mengharuskan instansi daerah menggunakan SiPAGA dalam kegiatan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, sebab dengan aplikasi ini kegiatan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dapat dilaksanakan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga terhindar dari kesalahan yang signifikan yang membuat terjadinya kerugian. Dan diadakan training atau pelatihan mengenai pengoperasian aplikasi SiPAGA dan pembekalan edukasi mengenai barang milik daerah serta kodefikasi barang sehingga memudahkan bagi para operator baru dalam pengoperasian aplikasi SiPAGA. BPKAD Provinsi Sumatera Barat khususnya pada sebaiknya membuat kebijakan sesuai dengan tahun anggaran berlaku sehingga tidak mempengaruhi pergantian atasan disaat tahun anggaran berjalan. Atasan harus menyesuaikan dengan kebijakan sesuai dengan tahun anggaran sampai tahun anggaran berakhir.

